

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah serta berlangsung pula globalisasi di mana tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan ke depan akan semakin berat, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk menjaga eksistensinya. Perguruan tinggi sekarang diharapkan mampu mandiri, menggali potensinya dan mampu membiayai operasional dari Perguruan Tinggi itu sendiri.

Perguruan tinggi secara umum bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri yang didanai dan dikelola oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh swasta. Pendanaan pada perguruan tinggi diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: 1) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); 2) Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; 3) Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; 4) Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; 5) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah, atau Lembaga non-Pemerintah; 6) Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan. Otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Kewenangan tersebut ditentukan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan status perguruan tinggi yang bersangkutan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi, kemudian akan diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui Menteri Pendidikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diselenggarakan oleh masyarakat, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi, akan diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada badan penyelenggara perguruan tinggi bersangkutan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi. Pimpinan perguruan tinggi bertugas menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat. Pengelolaan dana pendidikan, baik dari Pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana itu dibelanjakan. Namun kenyataannya, perhitungan biaya pendidikan saat ini menurut M. Nuh (2012) masih belum transparan dan akuntabel, terutama dalam sisi penggunaan anggaran dan sumber dana.

Salah satu persoalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkuliahan di Perguruan Tinggi adalah penentuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Besarnya biaya SPP yang dikeluarkan tentunya harus dianalisis dengan sangat baik, terutama jika dihubungkan dengan kualitas yang harus tetap dijaga dan diberikan kepada pelanggan yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Maka dari itu metode-metode analisis biaya terutama yang dihubungkan kepada *output* yang diberikan sangatlah diperlukan.

Efisiensi menjadi salah satu hal yang diperhatikan, sehingga semua biaya yang dikeluarkan diharapkan bisa seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.

Akademi Gizi Surabaya yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, dibawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan pendidikan vokasi Diploma III. Akademi Gizi Surabaya hanya memiliki satu program studi yaitu prodi Gizi. Pendanaan keuangan Akademi Gizi Surabaya terdapat dua sumber, yaitu dana subsidi dan dana fungsional. Dana subsidi diperoleh dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian digunakan untuk operasional Akademi Gizi Surabaya. Sedangkan dana fungsional diperoleh dari sewa gedung, sewa aula, kerjasama dengan pihak luar, dan termasuk SPP mahasiswa. Dengan adanya dana subsidi dari Pemerintah Daerah, maka dana SPP yang di dapat dari mahasiswa hanya digunakan untuk kegiatan operasional mahasiswa. Untuk menentukan besaran tarif SPP, diperlukan analisis yang tepat supaya nantinya bisa diketahui besarnya biaya setiap aktivitas akademik

mahasiswa. Kondisi tersebut kurang didukung oleh perhitungan yang jelas karena secara faktual terdapat banyak praktikum yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Uraian tersebut mengakibatkan perlunya penerapan perhitungan biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan konsep *Activity Based Costing* (ABC).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Yuni dkk. (2015), menyatakan bahwa terjadi selisih antara perhitungan besaran tarif SPP dengan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan metode *Activity Based Costing* (ABC) menunjukkan bahwa besarnya biaya yang ditanggung oleh mahasiswa tergolong masih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan oleh lembaga.

Perhitungan *Activity Based Costing* dimulai dengan penelusuran aktivitas-aktivitas dan kemudian memproduksi produk. Atau dengan kata lain, *Activity Based Costing* merupakan proses sistem perhitungan biaya yang berfokus pada aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan produk (Salman, 2017:80). Metode *Activity Based Costing* (ABC) dapat mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. *Activity Based Costing* diyakini akan memberikan hasil yang lebih akurat dimana biaya terjadi karena adanya aktivitas yang dilakukan. Pemicu atau pendorong terjadinya biaya pada masing-masing aktivitas tersebut yang kemudian disebut *cost driver* dijadikan sebagai dasar dalam mengalokasikan biaya ke produk. Sehingga dengan adanya penerapan metode ABC ini, diharapkan penetapan besaran SPP tunggal untuk prodi D III Gizi merupakan sebuah harga yang normal, adil dan wajar serta sesuai dengan pelayanan jasa yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Penerapan Metode *Activity Based Costing* dalam Menentukan Tarif SPP untuk Program Studi Diploma III Gizi pada Akademi Gizi Surabaya”.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Studi lapang ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Activity Based Costing* dalam menentukan tarif SPP untuk Program Studi Diploma III pada Akademi Gizi Surabaya.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Studi lapang yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu dapat menghasilkan model perhitungan yang menampilkan biaya pendidikan per mahasiswa secara transparan dan akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan strategis terkait perencanaan dan penganggaran bagi pihak Akademi Gizi Surabaya. Studi lapang ini dapat mengungkapkan alokasi, pembebanan dan dasar kebijakan kepada aktivitas akademik. Selain itu studi lapang ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan fakta yang ada. Studi lapang ini juga dapat dijadikan referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan *Activity Based Costing* dalam menentukan tariff SPP.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Supaya pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan studi lapang, maka penulis membatasi dan memfokuskan pada penerapan *Activity Based Costing* dalam menentukan tarif SPP untuk Program Studi Diploma III pada Akademi Gizi Surabaya.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan studi lapang. Data studi lapang yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Terdapat beberapa metode yang akan penulis gunakan dalam studi lapang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data tersebut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Observasi secara langsung ke lokasi penelitian meliputi ruang kelas dan laboratorium untuk mengamati kondisi saat ini yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, biaya operasional berupa kelengkapan sarana prasarana, dan fasilitas yang diperoleh mahasiswa.

Metode Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara akan dilakukan

dengan pihak yang berwenang menangani kebijakan perencanaan dan alokasi anggaran yaitu bagian tata usaha.

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh objek studi lapang. Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan – catatan yang berhubungan dengan studi lapang seperti *company profile*, peraturan gubernur, laporan keuangan, dan lain sebagainya.

